**Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam**

**Haslinda**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

PEMBIMBING

 **Supardin**

 **Abd. Rahman Qayyum**

Haslindasabir0898@gmail.com

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman system pembagian warisan menurut teori Hazairin, jika ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti. Ada beberapa pokok permasalahan yang dijabarkan adalah : 1). Apa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Hazairin, 2). Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, 3). Bagaimana teori Hazairin tentang ahli waris pengganti memengaruhi system hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu berdasarkan teori Hzairin, ahli waris pengganti berhak mendapatkan warisan sesuai dengan yang diperoleh Bapak/Ibunya seandainya masih hidup, tanpa ada diskriminasi antara cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Dan bagian untuk masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan posisi mereka masing- masing. Selanjutnya atas kesamaan keduduukan, ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1.

Dengan adanya teori Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, maka kepada masyarakat muslim khususnya di Indonesia diharapakan sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai warisan karena teori tersebut sudah sangat jelas pembagiannya dan dirasakan sudah cukup adil.

**Kata Kunci :** Ahli Waris Pengganti, Hazairin, Hukum Islam.

***Abstrack***

This study aims to determine how the inheritance distribution system according to Hazairin's theory, if the heir has died earlier than the heir. In this case what is meant is the distribution of inheritance to successor heirs. There are several main problems that are described are: 1). What is meant by a replacement heir according to Hazairin, 2). What is the legal basis used by Hazairin in determining the successor heir, 3). How Hazairin's theory of successor heir influences the Islamic inheritance law system.
Based on this research, several results were obtained, namely based on Hzairin's theory, a substitute heir is entitled to an inheritance in accordance with that obtained by the father / mother if he was still alive, without any discrimination between grandchildren or granddaughters. And the share for each successor or mawali according to Hazairin is in accordance with the number of the heirs that he replaces taking into account their respective positions. Furthermore, for the similarity of the two positions, the male replacement heir with the female successor heir 2: 1.
With the existence of Hazairin's theory in determining a replacement heir, it is hoped that the Muslim community, especially in Indonesia, will no longer have problems regarding inheritance because the theory is very clear in its distribution and is felt to be quite fair.
Keywords: Substitute Heir, Hazairin, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Islam agama yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Nilai-nilai Islam menjadi solusi dari setiap masalah yang ada. Banyak masalah atau hal yang muncul ditengah-tengah kehidupan manusia salah satunya adalah masalah tentang kewarisan. Hukum kewarisan Islam adalah salah satu sistem hukum yang pada dasarnya diatur dan dibentuk sesuai dengan sumbernya yaitu al-Qur’an dan hadis.

Berawal dari peristiwa perikatan perkawinan maka akan terjalin ikatan atau hubungan darah kekerabatan yang bilamana salah satu anggota keluarga meninggal dunia, maka akan berakibat hukum pada semua hak penuh yang dimiliki oleh anggota keluarga yang meninggal tersebut, semua hak yang dalam hal ini yaitu harta peninggalan akan jatuh kepemilikannya kepada para ahli warisnya. Namun, terdapat permasalahan bagi orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun terhijab (terhalang) oleh saudara pewaris, seperti cucu yang bapaknya lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris akan terhalang oleh saudara bapaknya.

*Al-huju*b terbagi dua, yakni *hujub bil washfi* (sifat atau julukan), yaitu orang yang terhalang mendapatkan wariisan secara mutlak karena membunuh pewarisnya atau murtad. Dan *hujub bi al-syakhsi* yaitu gugurnya hak waris seseorang karena adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.

*Al-hujub bi al-syakhshi* terbagi dua yaitu *hujub hirman* dan *hujub nuqshan*. Akan tetapi dalam pembahasan ini yang akan dijelaskan adalah mengenai ahli waris yang dapat terkena *Hujub Hirman* karena ini yang akan menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini.Terdapat enam belas ahli waris yang terkena *hujub hirman*, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita.

Beberapa ahli waris dari laki-laki yaitu:[[1]](#footnote-2)

1. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah dan juga oleh kakak yang lebih dekat dengan pewaris,
2. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah dan keurunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya),
3. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi ‘ashabah ma’al Ghair, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya),
4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan,
5. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lenih dekat),
6. Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak lakii-laki,cucu kandung laki-laki, sertah oleh saudara laki-laki seayah,
7. Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki),
8. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghakangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
9. Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghakangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung,
10. Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman seayah,
11. Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).

Sedangkan lima ahli waris dari kelompok wanita adalah:

1. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu,
2. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada ‘ashabah,
3. Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah,anak,cucu,cicit,dan seterusnya (semuanya laki-laki),
4. Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadii ‘ashabah ma’al ghabir. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga (2/3), kecuali bila adanya ‘ashabah,
5. Saudara perempuan seiibu akan terhalangi oleh adanya sosok laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).

Pembahasan teori ahli waris pengganti dalam skripsi ini mengenai pendapat tokoh yaitu Prof. DR. Hazairin, SH yang mengungkapkan adanya teori ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam, dengan ketentuan hukum yang dimuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang di sebut dalam pasal 173, dan ayat (2) dinyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[[2]](#footnote-3)

Pemikiran Hazairin dalam hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi ahli waris. Pada hakikatnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mewarisi meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adapun dalam hukum Islam, ahli waris pengganti atau yang disebut dengan istilah mawali dalam Al-Qur’an menurut tinjauan hukum Islam tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Quran.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Ahli Waris Pengganti menurut Hazairin?
2. Apa dasar Hukum Hazairin dalam Penetapan Ahli Waris Pengganti?
3. Bagaimana teori pemikiran Hazairin tentang Ahli Waris Pengganti mempengaruhi sistem hukum kewarisan islam?

**C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
2. Untuk mengetahui Siapa yang dimaksud dengan Ahli Waris Pengganti menurut Hazairin.
3. Untuk mengetahui Apa dasar hukum Hazairin dalam Penetapan Ahli Waris Pengganti.
4. Untuk mengetahui Sejauh mana teori pemikiran Hazairin tentang Ahli Waris Pengganti mempengaruhi sistem hukum kewarisan.
5. Kegunaan Penelitian:
6. Sebagai bahan penambah wawasan Ilmu pengetatahuan bagi mahasiswa terlebih terhadap masyarakat, tentang pemikiran Hazairin dalam penetapan ahli waris pengganti menurut sistem hukum kewarisan islam.
7. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di UIN Alauddin Makassar.
8. Sebagai bentuk konstribusi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari’ah dan hukum secara khusus dan mahasiswa-mahasiswi UIN Alauddin Makassar secara umum.

**PEMBAHASAN**

1. **Ahli Waris Pengganti menurut Hazairin**

Kalimat ahli waris pengganti atau yang biasa dikenal dengan kata *mawali* merupakan isim sifat yang berbentuk *muntaha al-jam’iy* yang bertimbangan dengan *mafa’ila* bentuk mufradnya *maulin* berwazan *muf’ilun*, yang artinya orang yang layak, orang yang pantas dan orang yang berhak. Kata *Maula* adalah lafadz yang berarti keberadaan, dan dinamakan antara garis kebawah dan keatas dalam maksud ahli waris dan Ashabah[[3]](#footnote-4). Mereka memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur’an.

Di dalam surah An-Nisa’ ayat 33 tersirat adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa” ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sementara bagian yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[[4]](#footnote-5) Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal, Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi: *“ Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjianmu karena itu berikanlah bagian-bagian warisannya”.[[5]](#footnote-6)*

Menurut penafsiran yang dilakukan oleh Hazairin di atas, jelas bahwa Al-Qur’an telah mengadakan *mawali* (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat.

Dan yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris[[6]](#footnote-7).

1. **Dasar Hukum Hazairin dalam menetapkan Ahli Waris Pengganti**

Dasar hukum hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti.Di dalam al-Qur’an ahli waris pengganti di atur dalam surah An-Nisa ayat 33:

**وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ**

**أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا**

Terjemahnya :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

1. **Analisis Teori Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Mempengaruhi Sistem Hukum Kewarisan Islam.**
2. **Pendekatan Pemikiran Hazairin**

Menetapkan ahli waris pengganti tidaklah mudah, dalam salah satu ijtihad yang di lakukan oleh Hazairin untuk menentukan hak kewarisan cucu ketika orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek/neneknya (pewaris) menimbulkan konsep penggantian. Meskipun *ijtihad* yang dilakukan oleh beliau memiliki cara pandang dan dasar hukum yang berbeda tentang kedudukan ahli waris pengganti di dalam *nash,* akan tetapi gagasan beliau ini mendapat respon positif di Indonesia yang pada akhirnya dimuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Penafsiran yang dilakukan Hazairin terkait ayat-ayat waris bisa dikatakan barang baru untuk konteks sekarang. Sebagai bagian dari usaha merekonstruksi format fiqh yang ada, hazairin menawarkan upaya penafsiran otentitik atas Al-Qur’an yaitu suatu usaha penafsiran yang akan menghasilkan kebenaran hakiki (suatu kebenaran yang tidak akan diperselisihkan lagi tingkat akurasinya karena sudah final)[[7]](#footnote-8).

Hal tersebut dilatarbelakangi pada orentrasi kajian Hazairin yaitu masalah kewarisan,maka operasionalisasi dari pola penafsiran nya bisa dilakukan dengan menghimpun semua ayat dan Hadis yang berhubungan dengan kewarisan dan lalu menafsirkannya sebagai suatu kesatuan yang saling menerangkan untuk membantu menjelaskan pengertian dan konsep-konsep yang ada dalam ayat yang dimaksud Hazairin menyarankan pemakaian kerangka ilmu antropologi.

Sebagaimana pendapat Mahsun Fuad menyatakan pendekatan yang digunakan Hazairin dalam upaya merumuskan hukum lslam adalah pendekatan sosio-kultural- historis dengan tetap mengacu pada dalil-dalil nash[[8]](#footnote-9).

Upaya untuk membangun dan merumuskan ijtihad atas berbagai ketetapan hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi dan situasi tertentu sehingga nuansa rekayasa dan sublimasi akan selalu tampak di dalamnya. Secara umum, sebagaimana di kutip oleh Mahsun Fuad dari pendapat Joachim Wach , bahwa pengalaman dan pemikiran keagamaan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya yang meliputi: konteks waktu, konteks ruang,konteks sejarah,konteks sosial,konteks budaya, konteksp sikologi, dan konteks agama[[9]](#footnote-10).

Melalui hasil-hasil keilmuan kontemporer dalam hal ini ilmu antropologi, difungsikan sebagai bahan pertimbagan utama dalam memahami nash, disini Hazairin memperkenalkan pola penafsiran baru dalam al-qur’an, dalam pandangan Hazairin ilmu antropologi mampu membuka potensi ayat-ayat qur’an tentang waris kedelam kerangka yang lebih luas. Jadi ayat-ayat al-Qur’an haruslah dipahami secara kontekstual. al-Qur’an tidak boleh dipahami hanya dalam konteks adat dan budaya Timur Tengah saja,karena hal itu akan membawa implikasi pada terjadinya benturan dan perasan asing bagi sebagian masyarakat muslim yang mempunyai adat dan budaya yang berbeda[[10]](#footnote-11).

Metode Hazairin dalam penafsirannya, adalah dengan cara membandingkan secara langsung segala ayat yang ada sangkut pautnya dengan pokok persoalan, meskipun persangkutannya itu dalam jarak yang jauh. Ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan sesuatu hal dihimpun menjadi kebulatan sebagai keseluruhan yang menentukan arti bagi setiap bagian dari keseluruhan itu, dengan demikian menurut sistem tafsir ini tidak diperbolehkan mengartikan suatu ayat terlepas dari makna dan maksud keseluruhannya[[11]](#footnote-12).

Dengan demikian tidak ada kemungkinan lagi bagi ayat yang menasakhkan ayat yang lain. Semua ayat al-Qur’an berlaku sepenuhnya, masing-masing dengan pengertiannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satu totalitas yang penuh.

1. **Analisis Kewarisan Hazairin**

**1). Penalaran ulama tafsir terhadap surah An-Nisa’ ayat 33**

Sebagaimana dalam bahasan diatas bahwa Hazairin mendasarkan ijtihadnya tentang *mawali* (ahli waris pengganti) dengan surat al-Nisa (4) ayat 33, dengan demikian penulis merasa perlu memaparkan penalaran ulama tafsir terhadap ayat diatas antara lain:

1. At-Thabari mengartikan kata-kata *mawali* pada ayat diatas dengan dua makna, pertama dengan semua ahli waris dan kedua dengan asabat[[12]](#footnote-13).
2. Zamakhsari mengungkapkan *I'rab* (struktur) dari ayat di atas kedalam tiga bentuk yaitu:

Pertama,



*Terhadap segala harta peninggalan orang tua dan anggota kerabat, kami jadikan mawali sebagai bagian ahli waris yang akan mengurus dan menguasai harta tersebut.*

Susunan di atas menjadikan *syai`* sebagai *mudhaf ilaih* dari lafal *kullun* dan menjadikan *walidan* dan seterusnya sebagai *fa'il* dari *taraka.* Dalam struktur ini, ayat tersebut hanya terdiri atas satu kalimat dan *mawali* diartikan sebagai ahli waris biasa.

Kedua,

*Bagi setiap kelompok yang kami jadikan mereka sebagai maula (ahli waris), ada bagian dari peninggalan orang tua dan anggota kerabat.*

Dalam struktur ini, *ja'alnahum mawaliya* menjadi sifat bagi *kullun; dhamir hum* yang kembali kepada *kullun* disini dituliskan, sedangkan dalam ayat dibuang.

Ketiga,

*Bagi setiap orang (pewaris) kami jadikan mawali (ahli waris) untuk harta peninggalannya yaitu : orang tua dan anggota kerabat.*

Dalam susunan ini, *mawali* ditafsirkan dengan ahli waris dan *min* menjadi *sifat* untuk mawali karena mengandung makna ahli waris[[13]](#footnote-14).

1. Rasyid Rida menyatakan bahwa menurut kuliah-kuliah yang diberikan oleh Muhammad Abduh, lafal *al-mawali* adalah *man lahum al-wilayah ‘ala at-tirkah* (orang yang berhak mengambil alih harta peninggalan), yaitu semua ahli waris[[14]](#footnote-15).
2. M. Quraisy Shihab menterjemahkan ayat diatas dengan "bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya[[15]](#footnote-16).

Dalam penjelasan tafsir diatas dapat diketahui bahwa tidak ada ulama tafsir yang menafsirkan kata-kata mawali dengan ahli waris pengganti[[16]](#footnote-17).

**2). Pemikiran ulama tentang cucu yang terhijab**

Terdapat bebrapa ulama yang sudah mengeluarkan fatwa-fatwanya tentang cucu yang terhijab oleh saudara bapaknya, seperti Ibnu Hazm menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabatnya yang tidak mewarisi,baik karena perbedaan agama, perbudakan, maupun karena terhijab. Yusuf Qardhawi menyatakan bagi cucu-cucu yang terhalang oleh pamannya mendapatkan warisan dari kakeknya dengan jalan wasiat wajibah dikarenakan kakek sering tidak mengindahkan atau tidak sempat melakukan wasiat terhadap ahli waris yang terhijab[[17]](#footnote-18).

Demikian juga Hasbi Ash-Shiddieqy dalam hal ini memberikan solusi bahwa untuk mengatasi masalah cucu yang terhijab,dapat dilakukan dengan wasiat wajibah[[18]](#footnote-19).

Abu Zahrah menambahkan kenyataan sering anak- anak yang kematian ayahnya tersebut hidup dalam kemiskinan sedang saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah dan kehilangan hak kewarisan, memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim ini, tetapi sering pula dia meninggal sebelum melakukannya, karena itulah undang-undang mengambil alih aturan yang tidak dikenal di dalam mazhab-mazhab empat tetapi menjadi pendapat beberapa ulama lain[[19]](#footnote-20).

Dalam perundang-undangan Mesir menjadikan wasiat wajibah untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu-cucu yang terhijab. Dalam undang-undang mesir tersebut menyatakan bahwa dorongan memasukkan pasal-pasal tadi adalah kenyataan seringnya muncul keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak yatim tidak mendapat warisan karena terhijab oleh saudara-saudara ayahnya. Walaupun seseorang pada galibnya berwasiat untuk cucu yang yatim ini, tetapi sering ajal yang tidak diduga menyebabkan wasiat itu tidak sampai terucapkan, karenanya undang-undang memberi tempat dan menguatkan keinginan yang tidak terucapkan tersebut sebagai telah (bahkan harus) diucapkan seseorang[[20]](#footnote-21).

Di Tunisia dan Irak juga menggunakan wasiat wajibah untuk mengatasi cucu-cucu yang terhijab. Pakistan menggunakan ahli waris pengganti untuk mengatasi masalah cucu-cucu yang terhijab[[21]](#footnote-22), namun sebagaimana amanat undang-undang Kekeluargaan Muslim Pakistan (*muslim Family Law Ordinance*) tahun 1961 Pasal 4[[22]](#footnote-23) menyatakan bahwa “*dalam keadaan ada anak lelaki atau perempuan pewaris yang telah meninggal dunia dan dia meninggalkan keturunan pada saat warisan akan dibagikan, maka anak-anak tersebut menerima saham sama persis dengan saham yang seharusnya diterima orang tua mereka”.*

Jadi, menurut pasal ini dapat di pahami bahwa anak menggantikan posisi bapaknya, dimana bapaknya meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan, bukan meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Menurut Prof. Dr. Hazairin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari Al-Qur’an maupun hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan mujtahid dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawali* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawali* dalam Al-Qur’an yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.[[23]](#footnote-24)

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya. Ayah dan ibu mewaris dari anaknya laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan orang perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan, Dalam surat Annisa ayat 7: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. ( Q.S : Annisa : 7 ).[[24]](#footnote-25)*

PENUTUP

1. **Kesimpulan**
2. Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Hazairin adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.
3. Rujukan Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti tidak lepas dari al-Qur’an. Dimana beliau menetapkan ahli waris pengganti atau yang biasa dikenal dengan istilah mawali yaitu al-Qur’an surah An-Nisa ayat 33.
4. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur’an, ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin bisa dikatakan mampu menciptakan teori yang dianggap layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hukum kewarisan Islam. Setelah melakukan analisis terhadap teori Hazairin, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pendiskriminasian antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan yang mewarisi dari ibu bapaknya. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan orang perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan. Cucu-cucu maupun cicit dari pewaris yang masih hidup berhak menggantikan posisi ibu atau bapaknya dan mendapatkan bagian kewarisan sesuai dengan yang diperoleh oleh bapak atau ibunya seandainya mereka masih hidup. Bagian untuk masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan posisi mereka masing- masing. Selanjutnya atas kesamaan keduduukan, maka ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1.
5. **Saran**
6. Bagi Masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar mencari tahu tentang pembagian kewarisan agar tidak terjadi masalah dalam hal pembagian warisan karena dengan melihat fenomena yang sekarang banyak orang yang saling membunuh atau memutuskan tali silaturahmi dalam keluarga karena mereka menganggap bagian yang mereka peroleh itu tidak adil.
7. Bagi penegak hukum dalam hal pembagian kewarisan, jika ada masyarakat yang berperkara diharapkan agar lebih bisa mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya menurut al-Qur’an dan hadis, Khususnya terhadap masyarakat yang kurang paham tentang hukum agar tidak membeda-bedakannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Muammar M. Bakry, MA. , *Akuntansi Dasar Mawaris,* Yogyakarta; Lembaga Ladang Kata Kampung Jagangrejo RT04 RW03Banguntapan Bantul, 2017, h. 45.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta), h. 63.

Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Anshori Al - Qurtuby, *Al - Jami‟ Ahkamul Qur‟an*, h.109. lihat juga Muhammad Ali Asshobuni, *Shofwah Attafasir*, h.273.

Ahmad Zahari, Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rekarnas Mahkamah Agung RI, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Balikpapan, h. 326.

Hazairin, Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur’an dan Hadits (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 27.

Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,*Jakarta: Sinar Grafika 1982. h. 108.

Edi Rudiana dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991, h. 29.

MahsunFuad, 2005, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*,Yogyaka,LKiS , Cet.I. h.14.

MahsunFuad, 2005, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*,… h. 15-16.

MahsunFuad, 2005, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*,… h. 222.

Hazairin, *Hukun Kewarisan Billateral Menurut Qur’an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas 1964), h. 3

Thabari, *Jami al-Bayan fi Takwil al-Qur’an*,Muassas Risalah, tt, 2000 M, jilid 5, h. 33-36.

Zamakhsari, *Kasysyaf,* tt, th, juz.1., h. 404.

Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Beirut, tt, Jilid 5, h. 64.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah,* Jakarta : Lentera Hati, cet.V, 2011, Jilid 2, h. 507.

Lihat Al-Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab.* Jakarta: Inis, 1998, h. 98-108.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawi Ma'asirah,* diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,*(Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid I, h. 640.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris, Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1973, h. 292.

Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris,* Kairo: Dar al-Fikr, tt, h.279.

Al-Kiski, *al-Miras al-Muqaran,* Baghdad, Jamiah Baghdad, cet.III, tt, h.194.

M. Isna Wahyudi, *Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti,* artikel di Badilag. Net. h. 15.

Teks Asli Undang-undang Kekeluargaan Muslim Pakistan, **Succession:** In the event of death of any son or daughter of the propositus before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per stripes, receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur’an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 26-32.

Hazairin, Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur’an dan Hadits,….h. 32.

1. . Muammar M. Bakry, MA. , *Akuntansi Dasar Mawaris,* Yogyakarta; Lembaga Ladang Kata Kampung Jagangrejo RT04 RW03Banguntapan Bantul, 2017, h. 45. [↑](#footnote-ref-2)
2. . Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta), h. 63. [↑](#footnote-ref-3)
3. . Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Anshori Al - Qurtuby, *Al - Jami‟ Ahkamul Qur‟an*, h.109. lihat juga Muhammad Ali Asshobuni, *Shofwah Attafasir*, h.273. [↑](#footnote-ref-4)
4. . Ahmad Zahari, Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rekarnas Mahkamah Agung RI, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Balikpapan, h. 326. [↑](#footnote-ref-5)
5. . Hazairin, Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur’an dan Hadits (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 27. [↑](#footnote-ref-6)
6. . Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,*Jakarta: Sinar Grafika 1982. h. 108. [↑](#footnote-ref-7)
7. . Edi Rudiana dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991, h. 29. [↑](#footnote-ref-8)
8. . MahsunFuad, 2005, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*,Yogyaka,LKiS , Cet.I. h.14. [↑](#footnote-ref-9)
9. . MahsunFuad, 2005, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris,… h. 15-16. [↑](#footnote-ref-10)
10. . MahsunFuad, 2005, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris,… h. 222. [↑](#footnote-ref-11)
11. . Hazairin, *Hukun Kewarisan Billateral Menurut Qur’an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas 1964), h. 3 [↑](#footnote-ref-12)
12. . Thabari, *Jami al-Bayan fi Takwil al-Qur’an*,Muassas Risalah, tt, 2000 M, jilid 5, h. 33-36. [↑](#footnote-ref-13)
13. . Zamakhsari, *Kasysyaf,* tt, th, juz.1., h. 404. [↑](#footnote-ref-14)
14. . Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Beirut, tt, Jilid 5, h. 64. [↑](#footnote-ref-15)
15. . M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah,* Jakarta : Lentera Hati, cet.V, 2011, Jilid 2, h. 507 [↑](#footnote-ref-16)
16. . Lihat Al-Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab.* Jakarta: Inis, 1998, h. 98-108. [↑](#footnote-ref-17)
17. . Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawi Ma'asirah,* diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,*(Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid I, h. 640. [↑](#footnote-ref-18)
18. . Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris, Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1973, h. 292. [↑](#footnote-ref-19)
19. . Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris,* Kairo: Dar al-Fikr, tt, h.279. [↑](#footnote-ref-20)
20. . Al-Kiski, *al-Miras al-Muqaran,* Baghdad, Jamiah Baghdad, cet.III, tt, h.194. [↑](#footnote-ref-21)
21. . M. Isna Wahyudi, *Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti,* artikel di Badilag. Net. h. 15. [↑](#footnote-ref-22)
22. . Teks Asli Undang-undang Kekeluargaan Muslim Pakistan, **Succession:** In the event of death of any son or daughter of the propositus before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per stripes, receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. [↑](#footnote-ref-23)
23. . Hazairin, *Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur’an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 26-32. [↑](#footnote-ref-24)
24. . Hazairin, Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur’an dan Hadits,….h. 32. [↑](#footnote-ref-25)